

KONSEP MONETER ISLAM DAN SOLUSINYA TERHADAP PENANGGULANGAN GUNCANGAN (*SHOCK*) EKONOMI

Oleh
Muhammad Fadhil Junery. SE.I

A. Pendahuluan

Limabelas tahun sudah Asia Tenggara khususnya Indonesia melewati sebuah peristiwa ekonomi yang telah membuka mata dan pikiran semua pihak betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai The East Asian Miracle dan macannya Asia (*Asian tiger*), tidak lama berselang terjadilah guncangan (*shock*) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi nilai tukar (*exchange rate*), pada tanggal 18 januari 1998 rupiah mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS.¹ Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60% dan PDB -13,20%.²

Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2007 secara umum berada dalam tekanan krisis pada sektor properti (kredit macet subprime mortgage) yang terjadi di Amerika Serikat serta melambungnya harga minyak dunia yang mencapai US \$100 per barrel dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih tetap dalam tekanan krisis subprime mortgage yang masih terus berlanjut di AS bahkan ada kecenderungan untuk semakin gawat, berpotensi harga minyak dunia mengalami kenaikan yang tajam, masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Serta dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sekitar 28,5% yang sudah dapat dipastikan berimplikasi kepada kenaikan harga-harga barang. Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan stabilitas yang terjaga, faktor-faktor eksternal di atas akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap

¹ Ismail Yusanto, 2001, *Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid), hal. 3

² Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Perbankan, hal. 4

dolar dan pencapaian target inflasi di tahun 2008. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor riil.³

Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam upayanya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung “berkutat” pada bagaimana menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi. Upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi memang sangatlah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter.⁴

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997-1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60% yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun

³ *Subprime mortgage* adalah sebuah fasilitas kredit rumah yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Oleh karenanya kredit ini mempunyai potensi gagal (*default*) bayar yang sangat tinggi. Lihat Kajian Stabilitas Keuangan No. 9, September 2007, hal. 16, <http://www.bi.go.id>

⁴ Undang Undang No. 23 Th. 1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan pencapaian kestabilan nilai rupiah, khususnya dalam bentuk inflasi, sebagai sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Conference on Monetary Policy and Inflation Targeting in Emerging Economies. <http://www.bi.go.id>

terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian.⁵

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang.⁶ Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.⁷

Sebagaimana disebutkan di atas, kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk dijaga yang merupakan cerminan dari inflasi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjaga kestabilan nilai mata uang kertas sekarang? Sistem moneter dunia kini dikuasai fiat money yang sangat rentan dengan *fluktuasi (Volatile)*, kecuali beberapa negara yang menggunakan uang *dwi-logam* (dinar dan dirham).⁸ Implikasi dari dominannya penggunaan fiat money, perjalanan perekonomian dunia senantiasa mengalami “pasangsurut”. Robert A Mundell, peraih nobel ekonomi, mengatakan ketika masyarakat dunia menggunakan fiat money, maka konsekuensi logisnya, mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru: *regime of permanent inflation* atau inflasi abadi.⁹ Hal yang sama juga dikatakan oleh William Cockett dalam tulisannya yang berjudul *Peper Againts Gold* (1828). Ia mengatakan bahwa utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas.¹⁰

Dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilnya nilai mata uang, Pemerintah dan otoritas moneter yang ada mengambil beberapa kebijakan baik dari segi moneter, fiskal, maupun sektor riil. Dari segi moneter maka bank sentral akan

⁵ Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyelesaian Perbankan, hal. 4

⁶ Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, <http://www.bi.go.id>

⁷ Mulya E. Siregar, 2001, Manajemen Moneter Alternatif, dalam Buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter. Cet. I (Jakarta; PIRAC, SEM Institute, Infid), hal. 88

⁸ Negara tersebut adalah Kuwait, Yordania, Tunisia, Bahrain, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Lihat, Benny, “Pengaruh Penggunaan Mata Uang Berbasis Emas (Dinar Kuwait) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003”, Skripsi: STIKER, Yogyakarta, hal. 11

⁹ A. Riawan. Mengendalikan atau Menghilangkan Inflasi, <http://www.sebi.ac.id>

¹⁰ Tarek El Diwany, 2003, The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya), cet. I (Jakarta: Akbar), hal. 53

menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbankan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter. Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya simpanan-simpanan (deposito) pihak-pihak partikular (bukan punya pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.¹¹

Tindakan BI, Pemerintah, dan Usaha Swasta dalam mengendalikan inflasi hanyalah sebatas menyentuh permasalahan teknis atau gejala (*symptom*) semata. Sebaliknya, perpaduan kebijakan yang digunakan menimbulkan krisis bertambah parah. Inilah sebuah dilema yang sampai saat ini belum terpecahkan sebagaimana secara jelas dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus. Bahkan mereka mengatakan kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh para ahli dalam memecahkan permasalahan inflasi dan pengangguran secara bersamaan justru menyebabkan efek sampingan yang lebih buruk dari penyakitnya itu sendiri. Ini terjadi dikarenakan “obat” yang diberikan hanya sebatas menghilangkan penyakit bagian permukaan saja, sementara penyakit bagian dalamnya masih belum disembuhkan.¹²

Penyakit bagian dalam yang belum tersentuh oleh perpaduan kebijakan di atas adalah terkait dengan hakikat mata uang itu sendiri dan sistem yang melingkupinya serta penyalahgunaan dari fungsi dasar uang sebagai alat tukar yang bertambah menjadi tidak hanya sebatas sebagai alat tukar, melainkan juga menjadi sebuah barang (komoditas) yang turut diperdagangkan dengan imbalan bunga (*interest*).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kehadiran kebijakan moneter alternatif (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan segera diaplikasikan. Dalam hal ini, Abdul Qadim Zallum (Pemimpin Ke 2

¹¹ Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, <http://www.bi.go.id>

¹² Pengendalian inflasi dalam perspektif al Quran, <http://www.dwicondro.blogspot.com>

Hizbut Tahrir) dalam bukunya *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* mengatakan bahwa, sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bias mendorong kemajuan perdagangan internasional.¹³

B. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam

1. Definisi Kebijakan Moneter dan Inflasi

Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hampir senada dengan definisi yang diutarakan Pohan, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁴

Wikipedia memberikan definisi kebijakan moneter dengan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter dari sebuah negara untuk mengontrol, penawaran uang, ketersediaan uang, tingkat bunga, dalam rangka mencapai seperangkat tujuan orientasi kepada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dimana biasanya kebijakan moneter dikenal sebagai pilihan antara kebijakan ekspansi atau kebijakan kontraksi. Definisi ini hampir senada dengan definisi yang diberikan oleh *Dictionary of Economics*, dimana dikatakan kebijakan moneter adalah suatu instrument kebijakan ekonomi makro yang mengatur penawaran uang, kredit

¹³ Abdul Qadim Zallum, 2002, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hal. 239

¹⁴ Aulia Pohan, 2008, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 11

dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan atau pengeluaran dalam perekonomian.¹⁵

Adapun definisi inflasi dalam *Dictionary of Economics* didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.

Definisi di atas mendapat kritikan cukup tajam dari mazhab ekonomi Austria. Ekonom dari mazhab Austria mengatakan bahwa definisi inflasi di atas tidak menggambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri. Definisi di atas hanya sebatas menjelaskan salah satu akibat inflasi.¹⁶

Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni:¹⁷
Pertama, tarikan permintaan (*demand-pull inflation*). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian.

Kedua, dorongan biaya (*cost-push inflation*). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.

¹⁵ Monetary Policy, dalam <http://www.wikipedia.com>

¹⁶ Murray N. Rothbard, 2007, *What has Government Done to Our Money?* (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?), cet I (Jakarta; Granit), hal. Xiii-xiv

¹⁷ Muhammad Shiddiq Al Jawi, Seputar Konsep Syakhsyah. <http://www.khilafah1924.org>

Bagaimana inflasi dalam perekonomian Islam? Sesungguhnya, apabila inflasi didefinisikan dengan kecendrungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi Kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi. Hanya saja, terdapat perbedaan yang cukup signifikan (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) antara permasalahan inflasi yang ada di dalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian kapitalis.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah dikarenakan mata uang yang digunakan dalam perekonomian Islam adalah bimetalik (dinar dan dirham). Dimana dalam diri dinar dan dirham tersebut mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan mata uang kertas yang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada *fiat money*) yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, inflasi yang disebabkan faktor lemahnya mata uang (depresiasi nilai) sebagaimana yang terjadi dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.

2. Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalah penggunaan variable instrumental oleh bank sentral untuk mempengaruhi pendapatan, kesempatan kerja dan tingkat harga. Dalam definisi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Prathama Rahardja dan Mandala Manurung dalam “*Teori Ekonomi Makro*” adalah upaya mengendalikan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar.¹⁸ Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar.¹⁹ Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar baik menambah atau memperbanyak untuk menstabilkan perekonomian. Pertumbuhan jumlah uang

¹⁸ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2005, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI), Edisi Ketiga, h. 269

¹⁹ Soediyono Reksoprayitno, 2000, *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif*, (Yogyakarta: BPFE), h. 48

beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran.

Saat ini negara manapun di dunia ini tidak akan terhindar dari krisis moneter tak terkecuali negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Begitu rentannya sistem ekonomi saat ini yang dipakai di seluruh dunia, sehingga negara-negara maju pun seperti Amerika Serikat tidak lepas dari krisis moneter. Tentunya krisis global yang terjadi saat ini bukan tanpa sebab, penerapan sistem ekonomi yang salah kaprah menstimulus gelombang krisis yang berkelanjutan.

Sistem yang dipakai di seluruh negara saat ini hanya memusatkan perhatian pada aspek produksi dan pertumbuhan kekayaan, tetapi mengabaikan distribusi kekayaan. Sebab utama dari krisis global yang terjadi di seluruh dunia adalah dipakainya *fiat money* dalam transaksi perekonomian. Sistem moneter berbasis *fiat money* seperti ini suatu negara sangat rentan dipermainkan perekonomiannya oleh segilintir orang dengan permainan spekulasi. Contoh kongkritnya seperti apa yang terjadi di Indonesia, dimana para spekulan untuk meraih keuntungan besar, mereka memborong Dollar dan melempar Rupiah. Sehingga agar menjaga Rupiah agar tidak terus jatuh Bank Indonesia menarik jumlah rupiah yang beredar di pasaran serta memperketat likuiditas.

Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipacu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan akan meningkat, merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya. Karena dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, uang yang sengaja hanya disimpan akan terus menurun berubah.

Dengan demikian sistem perekonomian ini mengarahkan para pemilik modal untuk terus berinvestasi di pasar uang karena begitu menguntungkan dengan tidak menyentuh sektor riil yang berpengaruh sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat.

2.1 Dinar dan Dirham (emas dan perak) sebagai Standar Mata Uang

Di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana eksistensi dari *fiat money* yang secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi. Lebih dari itu, ia merupakan faktor utama terjadinya inflasi dalam sistem Kapitalisme. Berbeda halnya dalam sistem ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang relatif cukup kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).

Mengapa demikian? Untuk mengetahui bagaimana dinar dan dirham dapat mengendalikan inflasi terlebih dahulu harus diketahui kelemahan dari fiat money. Setelah itu dikomparasikan dengan karakteristik mata uang dinar dan dirham. Telah diketahui bahwa, *fiat money* memiliki kelemahan yang teramat fatal. Sebaliknya, dinar dan dirham tidaklah memiliki kelemahan sebagaimana yang ditemukan dalam *fiat money*. Faktor fundamental dari kekuatan dinar dan dirham adalah setaranya antara nilai nominal dengan nilai intrinsik yang terdapat pada mata uang tersebut. Eksistensi nilai intrinsik ini akan secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang berdampak kepada naiknya komoditas impor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan tidak akan terjadi.²⁰

Berabad-abad sebelum dunia Barat bersusah payah melahirkan teori moneter yang silih berganti dan selalu memiliki kelemahan dan mengalami kegagalan, Islam sudah memiliki sistem moneter yang baku yang tidak bersifat trial and error atau coba-coba. Yang jelas teori moneter Islam lahir kurang lebih seribu tahun sebelum teori moneter pertama Eropa (*mercantilism*) diperkenalkan. Islam menjalankan sistem moneternya berbasis pada Dinar Emas dan Dirham Perak. Dalam sistem moneter Islam tidak hanya menyangkut uang Dinar dan Dirham saja, melainkan juga tentang aturan pemakaiannya.

²⁰ Inflasi yang disebabkan perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku ekonomi (antisipasi) dari kejadian yang akan datang perihal perkembangan ekonomi, yaitu: pembentukan harga di tingkat produsen, dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (UMR). Lihat Pengenalan inflasi di Indonesia dalam <http://www.bi.go.id>

Islam menggunakan uang emas Dinar dan uang perak Dirham sejak awal perkembangannya di awal abad ke 7 masehi dan terus menggunakannya secara konsisten selama 14 abad kemudian, dan berakhir saat runtuhnya Kekhalifahan Usmaniah tahun 1924.

Keandalan emas di kancah sejarah tak terbantahkan. Emas tetap menjadi komoditi yang diterima sebagai alat pembayaran perdagangan Internasional, karena nilainya. Logam mulia memiliki nilai jual, yang tidak dimiliki uang kertas. Berbeda dengan *fiat money*, emas sulit mengalami inflasi karena pemerintah tidak mungkin mencetak koin emas atau uang kertas yang sepenuhnya didukung emas secara tidak terbatas (*unlimited*).

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad menjadi arsitek utama mengampanyekan proposal untuk menerapkan Dinar dan Dirham dalam transaksi perdagangan Internasional terutama di dunia Islam. Mahatir meyakinkan bila Dinar dan Dirham bisa dipakai sebagai alat pembayaran internasional, minimal di dunia Islam, akan sangat mendukung dan meningkatkan volume perdagangan sekaligus mengurangi kerugian yang diakibatkan karena kurs bagi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dengan ideologi yang sama, semestinya implementasi Dinar dan Dirham secara teoritis lebih mudah diimplementasikan.

Isu penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat kebijakan moneter dan alat transaksi perdagangan di negara-negara Muslim marak digulirkan walaupun bukan sebuah usaha yang mudah. Apalagi bila penerapan Dinar dan Dirham mendapatkan pengakuan di dunia Internasional seperti Dollar dan Euro. Dimana dibutuhkan 50 tahun bagi Euro untuk diterapkan di benua Eropa.

Berdasarkan dinamika dan diskursus tentang penerapan Dinar dan Dirham di dunia Islam sebagai solusi dari permasalahan moneter yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, menurut penulis walaupun sukar, ini tidak berarti umat Islam tidak mampu menerapkan Dinar dan Dirham sebagai mata uang negara-negara Muslim yang telah terbukti tingkat kestabilannya. Bahkan tanpa penerapan Dinar dan

Dirham, institusi-institusi keuangan Islam seperti bank syariah, asuransi Islam, obligasi dan saham syariah, dan pagadaian syariah tidak akan dapat dioperasikan 100% murni berlandaskan al-Quran dan Hadist. Karena hingga kini operasional institusi keuangan Islam sangat sukar membebaskan dirinya dari praktek-praktak riba, gharar, gambling dan unsur-unsur spekulatif. Itulah sebabnya, upaya penerapan Dinar dan Dirham dalam dunia Islam harus diupayakan.

2.2 Hukum Riba

Pergerakan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional sangat bergantung pada sistem bunga. Begitu pentingnya sistem bunga bagi ekonomi Kapitalisme, maka dalam kebijakan moneter konvensional struktur suku bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir (inflasi).

Sistem bunga dalam sektor perbankan tidak dibolehkan dalam perekonomian Islam. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) bukan sistem bunga dengan penetapan kepastian return di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan disektor riil. Hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan pembiayaan di sektor riil berjalan lancar, maka return pada sektor moneter juga meningkat, jadi kondisi sektor moneter sebenarnya cerminan dari dari sektor riil.²¹

Hampir semua sektor ekonomi Kapitalisme terkait dengan system bunga, mulai dari sektor riil terlebih lagi adalah sektor non riil. Sistem bunga mengakibatkan sektor non riil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor non riil dalam memberikan keuntungan relatif lebih cepat dan besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sector riil. Akibatnya sektor riil mengalami kekurangan “darah” untuk menggerakkan roda ekonomi. Ketika roda ekonomi sudah

²¹ Nurul Huda, dkk, 2008, *Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predana Media Group), h. 168

berjalan lambat dan bahkan terhenti bisa dipastikan inflasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi.

Sebaliknya, Islam secara tegas berpendapat bahwa, bunga hukumnya adalah haram. Kalau bunga dalam Islam diharamkan, lalu bagaimana caranya menggerakkan roda ekonomi? Islam menggariskan bahwa, harta yang dimiliki oleh seseorang individu apabila ingin dikembangkan haruslah melewati cara yang memang dihalalkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini Islam memberikan tiga pilihan apakah dengan cara usaha mandiri, kerjasama pihak kedua (syarikah), dan kerjasama pihak ketiga (melalui lembaga mediasi Bank Syariah).²²

Dengan kata lain, Islam tidak mengizinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang (uang beranak uang) dengan sistem bunga. Kebijakan Islam melarang perdagangan uang ini tentunya akan mencegah uang beredar pada tempat tertentu saja (sektor non riil), sehingga kebutuhan “darah” (dana) bagi sektor riil dapat terpenuhi. Ketika dana segar bagi sektor riil telah tercukupi maka bisa dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi.

2.3 Hukum Kepemilikan (*Multitype ownership*)

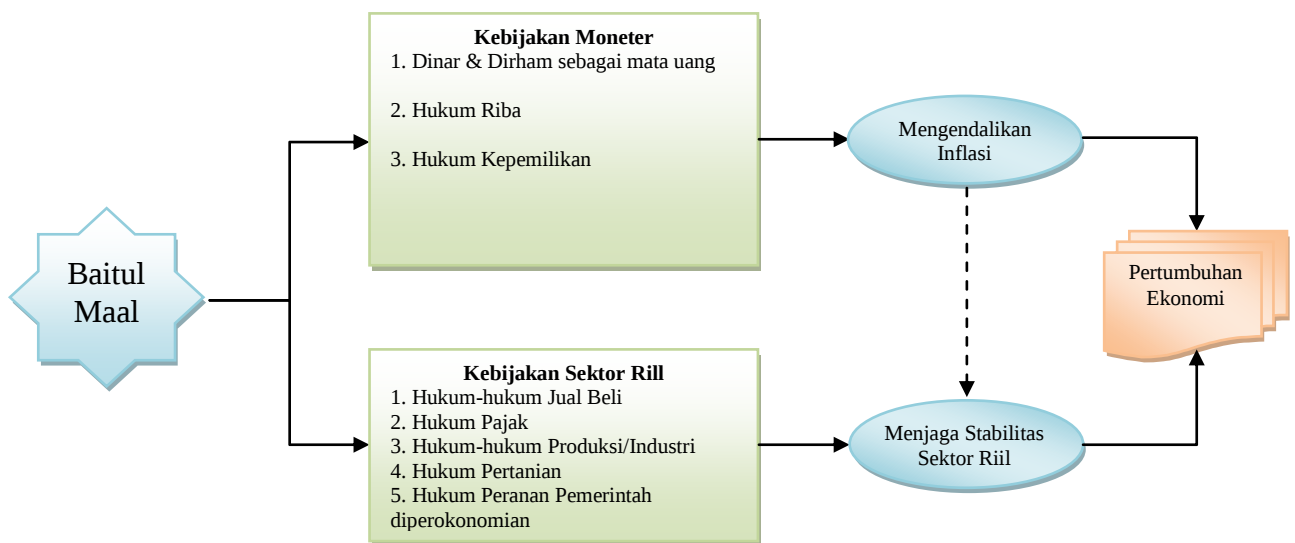
Multitype ownership, Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan yang diakui hanyalah kepemilikan individu semata yang bebas tanpa batasan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, hanya diakui kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara, dimana kepemilikan individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbal jasa yang sama rata. Dalam Islam kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Kepemilikan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, akan tetapi tetap ada

²² Ismail Yusanto, 2000, *Analisis Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Periode Krisis Ekonomi Tahun 1998 – 1999*. Program Pascasarjan Sekolah Tinggi Ekonomi IPWI Jakarta

batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kepemilikan individu tersebut. Pemilikan dalam ekonomi Islam adalah:

1. Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
2. Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang tersebut meninggal harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam
3. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak, sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Sektor Riil Perspektif Islam dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi



C. Konsep Islam dalam Mengatasi Krisis Ekonomi

Adapun konsep Islam dalam mengatasi krisis ekonomi, sebagai berikut :

Pertama: Sistem ekonomi Islam secara tegas melarang Riba dan penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Karena itu, haram menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua

sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya, sehingga haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Ekonomi Islam tidak mengenal dualisme ekonomi, yaitu ekonomi yang terdiri dari sektor riil dan sektor keuangan, dimana aktifitasnya didominasi oleh praktik pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi pada ekonomi riil. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi riil. Dengan demikian, semua aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta kekayaan tetap berputar. Larangan terhadap adanya bunga (riba) bisa dipraktikan dengan melakukan investasi modal di sektor ekonomi riil, karena penanaman modal di sektor lain dilarang. Walaupun masih ada yang berusaha menaruh sejumlah modal sebagai tabungan atau simpanan di bank (yang tentunya juga tidak akan memberikan bunga), modal yang tersimpan tersebut juga akan dialirkan ke sektor riil. Artinya, tiap individu yang memiliki lebih banyak uang bisa ia tanam di sektor ekonomi riil, yang akan memiliki efek berlipat karena berputarnya uang dari orang ke orang yang lain. Keberadaan bunga, pasar keuangan, dan judi secara langsung adalah faktor-faktor yang menghalangi perputaran harta.

Di Baitul Mal, rakyat juga mendapat bagian khusus untuk pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, sebagai bentuk bantuan untuk mereka, tanpa ada unsur riba sedikit pun di dalamnya. Semua agama melarang aktivitas ribawi, termasuk Islam sebagai agama penyempurna.

Allah Swt. berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian

tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” (QS al-Baqarah : 278-279).

Berdasarkan hal ini, transaksi riba yang tampak dalam sistem keuangan dan perbankan modern (dengan adanya bunga bank), seluruhnya diharamkan secara pasti, termasuk transaksi-transaksi *derivative* yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun pasar-pasar bursa. Penggelembungan harga saham maupun uang sehingga tidak sesuai dengan harganya yang wajar dan benar-benar memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalamnya adalah tindakan riba. Rasulullah saw.:

“(Boleh ditukar) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang setaras (sama nilai dan kualitasnya) dan diserahterimakan langsung (dari tangan ke tangan). Siapa saja yang menambahkan (suatu nilai) atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berbuat riba.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Sistem ekonomi Islam selalu menomorsatukan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat secara riil bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, sebagai isu utama yang memerlukan jalan keluar dan penerapan kebijakan. Sistem Islam memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda tentang ekonomi, sehingga jalur pengembangan ekonominya pun berbeda dari Kapitalisme.

Sistem Ekonomi Islam menfokuskan pada manusia dan pemenuhan kebutuhannya, bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Nabi Muhammad saw bersabda :

“Anak Adam tidak memiliki hak selain memiliki rumah untuk berteduh, pakaian untuk menutupi dirinya, dan sepotong roti dan seteguk air.” (Hr. At-Tirmidhi).

Dasar pemikiran yang membentuk sistem ekonomi Islam melahirkan kebijakan dan peraturan yang diarahkan untuk mencapai fokus tersebut. Islam menaruh perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana yang diterangkan dalam hadith sebelumnya, ketimbang pada penambahan angka GDP saja.

Kedua: Sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum, seperti minyak, tambang, energi dan listrik yang digunakan sebagai bahan bakar. Islam menjadikan negara sebagai penguasanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Negara diwajibkan oleh Islam untuk memiliki peran langsung dalam pencapaian tujuan ekonomi, dan tidak begitu saja membiarkannya kepada sistem pasar bebas. Nabi Muhammad Saaw bersabda,

“Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.” (H.r. Ibn Majah)

Berdasarkan dari hadits Nabi tersebut, negara menguasai kepemilikan dari sumber daya alam berbasis api seperti minyak, gas bumi, penyulingan, instalasi pembangkit listrik sebagaimana sumber air. Dengan demikian, masyarakat tidak akan rawan untuk menjadi obyek eksploitasi perusahaan swasta yang meraup keuntungan dari instalasi strategis yang tersebut diatas. Negara juga akan mengontrol lembaga-lembaga yang mengatur atau mengurus instalasi tersebut sehingga mampu untuk segera bertindak ketika diperlukan dan sebelum terlambat.

Ketiga: Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap, dan tidak berubah.

Seluruh dunia di masa lalu terus menerus menggunakan standar emas dan perak itu sebagai mata uang sampai beberapa saat sebelum Perang Dunia I, ketika penggunaan standar tersebut dihentikan. Seusai Perang Dunia I, standar emas dan perak kembali diberlakukan secara parsial. Kemudian penggunaannya semakin berkurang dan pada tanggal 15 Juli 1971 standar tersebut secara resmi dihapus, saat dibatalkannya sistem Bretton Woods yang menetapkan bahwa dollar harus ditopang dengan jaminan emas

dan mempunyai harga yang tetap. Dengan demikian, sistem uang yang berlaku adalah sistem uang kertas inkonvertibel, yang tidak ditopang jaminan emas dan perak, tidak mewakili emas dan perak, dan tidak pula mempunyai nilai intrinsik. Nilai pada uang kertas tersebut hanya bersumber dari undang-undang yang memaksakan penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*).

Negara-negara penjajah telah memanfaatkan uang tersebut sebagai salah satu alat penjajahan. Mereka mempermainkan mata uang dunia sesuai dengan kepentingannya dan membangkitkan goncangan-goncangan moneter serta krisis-krisis ekonomi. Mereka juga memperbanyak penerbitan uang kertas inkonvertibel tersebut, sehingga berkecamuklah inflasi yang menggila, yang akhirnya menurunkan daya beli pada uang tersebut. Inilah salah satu faktor yang menimbulkan kegoncangan pasar modal.

D. Kesimpulan dan Penutup

Islam selain memiliki *fikrah* (konsep) juga memiliki *thariqoh* (metode) bagaimana menerapkan konsep yang telah ada tersebut. Lebih dari itu, konsep Islam antara satu dengan yang lainnya salingterkait erat. Oleh karena itu, segala konsep yang diajarkan dalam Islam tidaklah dapat diterapkan secara parsial. Konsep Islam perlu dan harus diterapkan secara *kaffah* (totalitas).

Pada intinya, manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif sehingga instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan.

Dalam teori endogenous uang dalam Islam, tidak menjadikan uang sebagai variable yang aksioner dalam kebijakan moneternya. Uang hanyalah representasi saja dari pergerakan dan pertumbuhan sektor riil. Segala kebijakan kebijakan untuk mempengaruhi sektor ekonomi selalu dimulai dari sisi sektor riil bukan sektor moneter.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail Yusanto, *Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Cet. I, Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001

Tarek El Diwany. *The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya)*, cet. I (Jakarta: Akbar, 2003)

Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002)

Aulia Pohan. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)

Murray N. Rothbard. *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?)*, cet I (Jakarta; Granit, 2007)

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga

Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)

Nurul Huda, dll, *Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008)